

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2023



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. HERRI SWANTORO, SH.MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

(Dr. H. HERRI SWANTORO, SH.MH.)

Cikarang, 5 Januari 2023
Pihak Kesatu
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

(EDDI DAULATTA SEMBIRING, SH.,MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	95%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi	90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	85 %
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Pengadilan	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Disampaikan ke para Pihak Tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	35 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.302.885.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 271.500.000
Total Anggaran		Rp. 8.574.385.000

(Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Cikarang, 5 Januari 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

(Dr. HERRI SWANTORO, SH.MH.)

Pihak Kesatu
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

(EDI DAULATTA SEMBIRING, SH.MH.)

